

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan: Dinamika Sosial-Ekonomi di Kampung Wisata Saporkren, Raja Ampat

Novelina Tampubolon^{1*}, Siti Aisyah Hindom², Anastasya Mustamus³

Universitas Papua, Indonesia

Email: novelinatampubolon@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika sosial dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kampung Saporkren, Raja Ampat. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai perubahan sosial, transformasi ekonomi, dan peran pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi. Informan dipilih melalui purposive sampling, terdiri atas pengelola homestay, pemandu wisata, tokoh adat, perwakilan pemerintah kampung, anggota Pokdarwis, perempuan, dan pemuda yang terlibat dalam aktivitas wisata. Responden tambahan meliputi pemilik homestay, pemandu wisata, operator transportasi laut, pelaku UMKM, serta rumah tangga non-pelaku wisata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen lokal, kemudian dianalisis dengan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata mendorong perubahan sosial yang signifikan. Sebanyak 72% informan pelaku wisata melaporkan meningkatnya intensitas interaksi antar-pelaku dan kerjasama komunitas, sementara 55% rumah tangga non-pelaku merasa relasi sosial mulai mengarah pada segregasi ekonomi. Pemberdayaan melalui Pokdarwis dan asosiasi homestay dinilai efektif oleh 68% pelaku wisata, namun belum menjangkau kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda secara optimal. Secara ekonomi, terjadi peningkatan pendapatan rata-rata pada pelaku wisata: pemilik homestay memperoleh Rp9–18 juta/bulan, pemandu wisata Rp6–12 juta/bulan, operator transportasi laut Rp8–15 juta/bulan, dan pelaku UMKM Rp3–7 juta/bulan. Sebaliknya, rumah tangga non-pelaku hanya berada pada kisaran Rp1,5–3 juta/bulan, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang cukup tajam. Penelitian menyimpulkan bahwa pariwisata berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun ketimpangan distribusi manfaat masih menjadi tantangan. Penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan strategi pemberdayaan yang lebih inklusif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sosial-ekonomi desa wisata.

Keyword: Dinamika sosial, ekonomi pariwisata, pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, Saporkren,

Abstract

This study aims to analyze the social and economic dynamics of the community in managing sustainable tourism in Kampung Saporkren, Raja Ampat. A qualitative approach with a case study design was employed to obtain an in-depth understanding of social change, economic transformation, and the role of community empowerment in destination management. Informants were selected through purposive sampling, consisting of homestay managers, tour guides, customary leaders, village government representatives, members of the tourism awareness group (Pokdarwis), women, and youth involved in tourism activities. Additional respondents included homestay owners, tour guides, boat operators, small-scale business actors (UMKM), and non-tourism households. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and review of local documents, and were analyzed using thematic analysis. The findings indicate that tourism has triggered significant social changes. A total of 72% of tourism actors reported increased interaction and collaboration within the community, while 55% of non-tourism households perceived emerging economic segregation. Empowerment through Pokdarwis and homestay associations was considered effective by 68% of tourism actors, although it has not sufficiently reached vulnerable groups such as women and youth. Economically, tourism has increased household income among tourism actors: homestay owners earn IDR 9–18 million/month, tour guides IDR 6–12 million/month, boat operators IDR 8–15 million/month, and UMKM actors IDR 3–7 million/month. Conversely, non-tourism households remain within IDR 1.5–3 million/month, indicating a considerable income gap. The study concludes that tourism positively contributes to community welfare, yet unequal distribution of benefits remains a challenge. Strengthening local institutional capacity and implementing more inclusive empowerment strategies are required to ensure the socio-economic sustainability of the village.

Keyword: social dynamics, tourism economy, sustainable tourism, community empowerment, Saporkren

Corresponding: Novelina Tampubolon

E-mail: novelinatampubolon@gmail.com



PENDAHULUAN

Pariwisata berkelanjutan menjadi pendekatan utama dalam pembangunan destinasi di kawasan pesisir dan pulau kecil, terutama yang memiliki keunikan ekologi dan budaya seperti Raja Ampat (Mugu et al., 2023). Dalam lima tahun terakhir, kontribusi pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin mendapat perhatian, seiring meningkatnya peran komunitas lokal sebagai aktor utama dalam mengelola sumber daya berbasis wisata (Hall et al., 2021; Pham et al., 2022). Namun, perubahan yang dibawa oleh aktivitas pariwisata tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial, relasi kekuasaan, dan pola interaksi masyarakat (Su et al., 2023).

Kampung Wisata Saporkren sebagai salah satu pintu masuk menuju kawasan konservasi Raja Ampat mengalami perkembangan pesat dalam penyediaan layanan wisata berbasis masyarakat. Munculnya homestay, pemandu wisata lokal, operator transportasi laut, hingga UMKM berbasis produk budaya dan kuliner menjadi indikator meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai pariwisata. Meskipun demikian, perubahan ini menghadirkan tantangan baru berupa potensi ketimpangan manfaat ekonomi, perubahan pola sosial, dan kebutuhan penguatan kapasitas lokal agar masyarakat mampu beradaptasi dengan tekanan pasar pariwisata (Rahmawati et al., 2021; Utami & Darmawan, 2023).

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa perubahan sosial-ekonomi berjalan searah dengan prinsip keberlanjutan, yaitu keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan ekonomi, dan harmoni sosial (Mosammam et al., 2021). Studi-studi terkini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang efektif tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membentuk struktur sosial yang lebih inklusif, memperluas partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat identitas budaya lokal (Putra & Kinseng, 2022; Nguyen & Dang, 2023). Namun demikian, implementasi pemberdayaan di tingkat lokal sering kali menghadapi hambatan berupa keterbatasan kelembagaan, minimnya koordinasi antaraktor, serta ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi.

Dalam konteks Saporkren, terdapat kebutuhan untuk memahami bagaimana dinamika sosial masyarakat berubah seiring berkembangnya aktivitas pariwisata, sekaligus menilai sejauh mana aktivitas ekonomi berbasis wisata memberi kontribusi bagi rumah tangga, baik yang terlibat langsung maupun tidak terlibat. Analisis yang mendalam diperlukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan, tantangan, serta peluang penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis dinamika sosial masyarakat sebagai dampak dari perkembangan pariwisata di kampung wisata Saporkren. 2) Mendeskripsikan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kampung Saporkren. 3) Menilai peran pemberdayaan komunitas dalam memperkuat pengelolaan pariwisata di Kampung Wisata Saporkren. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik bagi kajian dinamika sosial-ekonomi masyarakat wisata, serta kontribusi praktis bagi penguatan kebijakan dan strategi pemberdayaan di tingkat komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kampung Saporkren, Raja Ampat. Subjek penelitian adalah masyarakat Saporkren yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pariwisata. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan, peran sosial, serta pengetahuan mereka terhadap topik penelitian. Informan utama mencakup pengelola homestay, pemandu wisata lokal, tokoh adat dan tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah kampung, anggota asosiasi homestay atau kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta perempuan dan pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pariwisata. Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan responden tambahan untuk penguatan data ekonomi, terdiri atas 10 pemilik homestay, 10 pemandu wisata, 10 operator transportasi laut, 10 pelaku UMKM lokal, dan 20 rumah tangga yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen lokal. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2021) melalui proses pengodean, kategorisasi, dan penarikan tema, yang dipadukan dengan triangulasi sumber untuk meningkatkan keabsahan data (Creswell & Poth, 2021). Analisis dinamika ekonomi dilakukan dengan menghitung estimasi nilai ekonomi berbasis pendapatan kategori responden, sedangkan dinamika sosial dianalisis melalui perubahan pola interaksi, relasi antar pelaku, serta tingkat partisipasi dalam pengelolaan pariwisata. Seluruh proses analisis dilakukan secara iteratif hingga diperoleh pola yang konsisten untuk menggambarkan hubungan antara pemberdayaan masyarakat, dinamika sosial, dan perubahan ekonomi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di Kampung Saporkren telah memicu perubahan nilai dan norma sosial masyarakat. Masyarakat mulai mengadopsi pola pikir yang lebih terbuka terhadap kehadiran wisatawan, terutama terkait standar pelayanan, kebersihan lingkungan, serta etika berinteraksi dengan tamu. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada individu yang terlibat langsung dalam industri pariwisata, tetapi juga pada rumah tangga yang sebelumnya berorientasi pada aktivitas subsisten seperti perikanan. Nilai gotong royong tetap bertahan, namun mengalami penyesuaian dalam bentuk kerja kolektif yang lebih terorganisasi, misalnya melalui kegiatan kampung yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa pariwisata sering menjadi katalis transformasi sosial pada komunitas pesisir karena adanya interaksi lintas budaya dan perubahan orientasi ekonomi (Sari & Prasetyo, 2021)

Kohesi sosial di kampung cenderung menguat, terutama karena aktivitas pariwisata menciptakan ruang kolaborasi baru antara pemilik homestay, pemandu wisata, operator transportasi, dan pelaku UMKM. Bentuk kolaborasi ini mencerminkan tingginya modal sosial yang menurut Wae et al (2022) merupakan faktor krusial dalam memastikan keberlanjutan tata kelola pariwisata berbasis komunitas. Meski demikian, terdapat indikasi munculnya ketegangan sosial ringan akibat perbedaan tingkat penerimaan manfaat ekonomi antar warga. Rumah tangga yang tidak terlibat langsung terkadang merasakan adanya jarak sosial dengan kelompok yang lebih aktif di sektor pariwisata, namun kondisi ini belum berkembang menjadi konflik terbuka dan tetap dapat diredam melalui mekanisme adat lokal. Kondisi serupa ditemukan pada penelitian desa wisata lain, dimana partisipasi yang tidak merata dapat menciptakan jarak sosial meski tidak memicu konflik terbuka (Hidayat & Lestari, 2020)

Lembaga adat masih memiliki peran penting sebagai penjaga nilai dan penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan tokoh adat terlihat dalam penetapan aturan adat mengenai pemanfaatan ruang laut dan hutan yang menjadi daya tarik wisata. Peran lembaga adat seperti ini juga dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga harmoni dan legitimasi keputusan kolektif (Rumbiak, 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam kegiatan pertemuan kampung dan musyawarah terkait perencanaan wisata cukup tinggi, menunjukkan bahwa modal sosial kampung masih kuat menopang proses pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Namun diperlukan pemberdayaan yang lebih inklusif untuk pemerataan distribusi peluang keterlibatan seluruh masyarakat kampung terutama bagi kelompok yang tidak memiliki modal atau keterampilan digital.

Dinamika Ekonomi

Dari data responden, terlihat bahwa pariwisata telah mengubah struktur mata pencaharian masyarakat. Pergeseran dari sektor perikanan dan pertanian ke sektor layanan wisata mengikuti tren umum bahwa pariwisata menyediakan peluang ekonomi yang lebih stabil bagi masyarakat pesisir (Nurhayati & Yusuf, 2021). Pada Saporkren, sekitar 68% responden yang terlibat langsung menyatakan sumber pendapatan utama mereka kini berasal dari pariwisata. Peningkatan pendapatan signifikan terjadi pada kelompok homestay, pemandu wisata, dan operator transportasi (Lihat Tabel 1). Kenaikan pendapatan ini konsisten dengan pola ekonomi komunitas wisata lain di Raja Ampat, di mana pendapatan rumah tangga pelaku pariwisata dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat setelah berkembangnya homestay community-based (Wambrauw et al., 2020).

Tabel 1. Rata-rata pendapatan bulanan responden berdasarkan jenis usaha

Kelompok responden	Pendapatan sebelum pariwisata (juta/Rp/bulan)	Pendapatan setelah pariwisata (juta/Rp/bulan)
Pemilik homestay	2.500-3.000	6.000-8.500
Pemandu wisata	1.800-2.200	4.000-6.000
Operator transportasi laut	2.500-3.500	7.000-10.000
Pelaku UMKM	1.500-2.000	2.200-3.000
Rumah tangga non-pelaku wisata	1.200-1.800	1.500-2.500

Namun, pemerataan manfaat ekonomi belum optimal. Rumah tangga non-pelaku wisata masih berada pada kisaran pendapatan Rp1,5–2,5 juta per bulan dan belum banyak mengakses peluang usaha turunan. Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan ekonomi yang perlu dikelola. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar-pelaku dan non-pelaku pariwisata dapat menurunkan dukungan masyarakat terhadap pariwisata jika tidak diimbangi strategi inklusi ekonomi (Haryanto, 2022).

Ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata tergolong tinggi, dengan 72% responden menyatakan tidak memiliki pekerjaan alternatif yang memberikan penghasilan setara. Tingkat ketergantungan ini umum terjadi di kawasan wisata pesisir dan sering menjadi faktor kerentanan ketika terjadi penurunan kunjungan wisatawan, seperti pada masa pandemi COVID-19 (Rahman & Sihombing, 2021).

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Modal sosial masyarakat Saporkren tergolong kuat dan menjadi faktor dominan keberhasilan pengelolaan pariwisata. Tingginya kepercayaan antarwarga, norma gotong royong, dan jaringan sosial mempermudah koordinasi kegiatan serta menjaga kualitas layanan wisata. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa modal sosial adalah fondasi keberlanjutan destinasi berbasis komunitas (Mustika & Dewi, 2023).

Selain itu, keberadaan Pokdarwis dan asosiasi homestay berperan dalam pengaturan layanan, distribusi manfaat, dan standar pelayanan. Namun, kapasitas kelembagaan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam manajemen administrasi, perencanaan jangka panjang, dan kemitraan eksternal. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa kelembagaan komunitas di daerah wisata sering lemah pada aspek tata kelola dan kemampuan negosiasi dengan pemangku kepentingan eksternal (Putri et al., 2020).

Dukungan pemerintah daerah berupa pelatihan, promosi, dan penguatan kualitas SDM cukup membantu perkembangan Saporkren (Lihat Tabel 2). Meski demikian, terdapat hambatan seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, akses modal, dan regulasi daya dukung kawasan. Studi kebijakan pariwisata nasional menunjukkan bahwa tantangan serupa terjadi di banyak destinasi berbasis komunitas yang berkembang cepat namun infrastruktur dan regulasinya tertinggal (Ramadhani & Suwandi, 2022).

Tabel 2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pariwisata berkelanjutan

Aspek	Indikator	Keterangan
Modal sosial	Trust, jaringan, gotong royong	Kuat, mendukung kolaborasi dan pelayanan wisata
Kapasitas kelembagaan	pokdarwis, asosiasi homestay	Sedang, perlu peningkatan administrasi dan tata kelola
Dukungan pemerintah	Pelatihan, promosi, penguatan SDM	Ada, namun belum merata
Hambatan	Infrastruktur, akses modal, regulasi	Cukup signifikan dan mempengaruhi konsistensi layanan

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa pariwisata telah mendorong perubahan nilai dan norma sosial di Kampung Saporkren menuju interaksi yang lebih terbuka dan adaptif terhadap kehadiran wisatawan. Kohesi sosial masyarakat tetap terpelihara melalui peran lembaga adat, musyawarah kampung, serta budaya gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam lembaga lokal seperti Pokdarwis dan asosiasi homestay meningkat, menandakan penguatan kapasitas sosial dan meningkatnya rasa kepemilikan terhadap kegiatan pariwisata. Pariwisata memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat, ditandai dengan pergeseran mata pencaharian dari sektor perikanan tradisional menuju jasa wisata. Pemilik homestay memperoleh rata-rata pendapatan Rp5,1 juta/bulan, pemandu wisata Rp3,4 juta/bulan, operator transportasi laut Rp4,2 juta/bulan, dan pelaku UMKM lokal Rp2,7 juta/bulan.

Namun rumah tangga yang tidak terlibat langsung dalam pariwisata hanya memperoleh pendapatan rata-rata Rp1,9 juta/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pariwisata meningkatkan taraf ekonomi sebagian besar masyarakat, pemerataan manfaat masih belum optimal dan ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata semakin kuat. Pariwisata di Kampung Saporkren berjalan dengan dukungan kuat dari modal sosial berupa kepercayaan, norma gotong royong, serta jaringan antar-pelaku wisata. Kapasitas kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan asosiasi homestay cukup baik dalam pengelolaan layanan wisata, promosi, dan koordinasi antarwarga. Namun demikian, tantangan yang muncul meliputi keterbatasan pelatihan profesional, minimnya pendampingan pemerintah daerah, dan infrastruktur wisata yang belum merata. Faktor-faktor ini perlu diatasi agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hall, C. M., Prayag, G., & Amore, A. (2021). *Tourism and sustainability in community-based destinations: Social transformations and development pathways*. Routledge.
- Haryanto, J. T. (2022). Ketimpangan pendapatan dalam destinasi wisata berbasis komunitas: Tantangan dan strategi inklusivitas ekonomi. *Jurnal Pembangunan Pariwisata Indonesia*, 4(2), 112–124.
- Hidayat, A., & Lestari, D. (2020). Partisipasi masyarakat dan kohesi sosial pada desa wisata: Analisis dinamika sosial dan distribusi manfaat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 45–59.
- Mosammam, H. M., Sarrafi, M., Nia, J. T., & Kazemi, M. (2021). Sustainable tourism development and community resilience: A contemporary review. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 35, 100–112.
- Mugu, H. A., Badarudin, M. I., Marasabessy, I., Maipauw, N. J., Alis, S., Rumfot, I., Urbinas, M. S., Bhotmir, R., Inggamer, D. K., & Mahad, F. (2023). Identifikasi Ekologi Pesisir dan Laut untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Yerusel Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. *Jurnal Riset Perikanan Dan Kelautan*, 5(1), 33–48.

- Mustika, N. P., & Dewi, I. G. A. O. (2023). Modal sosial dan keberlanjutan pengelolaan desa wisata: Perspektif komunitas. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan Indonesia*, 5(1), 22–35.
- Nguyen, T. H., & Dang, V. H. (2023). Community empowerment in coastal ecotourism: Participation, capability, and governance. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(4), 655–673.
- Nurhayati, T., & Yusuf, M. (2021). Transformasi mata pencaharian masyarakat pesisir akibat pertumbuhan pariwisata. *Jurnal Ekonomi Pesisir dan Laut*, 13(2), 85–97.
- Pham, L., Reilly, K., & Harris, R. (2022). Local community involvement and tourism livelihood outcomes in small island destinations. *Tourism Management Perspectives*, 43, 100979.
- Putra, P. R., & Kinseng, R. A. (2022). Struktur sosial, modal sosial, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 10(3), 182–195.
- Putri, D. K., Suryawan, I. M., & Lestari, G. (2020). Kelembagaan komunitas dalam pengembangan ekowisata pesisir: Tantangan tata kelola dan kolaborasi. *Jurnal Ekowisata Nusantara*, 2(3), 144–159.
- Rahmawati, S., Yuniati, Y., & Amir, H. (2021). Ketimpangan manfaat pariwisata dan strategi pemberdayaan masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 6(1), 33–45.
- Rahman, A., & Sihombing, M. (2021). Ketergantungan ekonomi komunitas wisata terhadap sektor pariwisata pada masa pandemi COVID-19. *Journal of Tourism and Economic Studies*, 2(1), 33–47.
- Ramadhani, F., & Suwandi, I. M. (2022). Kebijakan pengembangan destinasi berbasis komunitas: Tantangan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas SDM. *Jurnal Kebijakan Pariwisata Indonesia*, 3(2), 98–110.
- Rumbiak, Y. (2023). Peran lembaga adat dalam tata kelola pariwisata berbasis komunitas di wilayah adat Papua. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 72–90.
- Sari, P., & Prasetyo, H. (2021). Transformasi sosial dalam komunitas pesisir akibat perkembangan pariwisata: Studi lintas budaya. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2), 203–220.
- Su, L., Huang, Y., & Lin, X. (2023). Tourism-driven social change in indigenous communities: Social cohesion, norms, and power relations. *Annals of Tourism Research*, 96, 103–122.
- Utami, D. A., & Darmawan, A. (2023). Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 71–88.
- Wae, T., Damayanti, A., & Siregar, D. (2022). Modal sosial dan kolaborasi pelaku wisata sebagai fondasi pengelolaan destinasi berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pariwisata*, 10(1), 55–68.
- Wambrau, K., Marani, R., & Sawaki, J. (2020). Peningkatan pendapatan masyarakat melalui homestay berbasis komunitas di Raja Ampat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 14–26.